

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 5.108 unit rumah kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan kebijakan skema selisih angsuran (SSA) atau subsidi selisih bunga (SSB) belum dimanfaatkan oleh debitur.

Atas temuan tersebut, BPK memerintahkan para kepala kantor cabang membentuk tim pemantauan pemanfaatan rumah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada BLU PPDPP (Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan).

BLU PPDPP dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pemanfaatan rumah dan secara bulanan melaporkan kepada BLU PPDPP. (*Harian Jogja*, Rabu [4/10]).

Temuan itu merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. Pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan KPR sejahtera dan SSA/SSB dilakukan kepada PT Bank Tabungan Negara Tbk, terutama di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan bertujuan

untuk menilai efektivitas pengelolaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan KPR sejahtera dan SSA/SSB yang dilakukan BTN.

Dalam pemeriksaan, BPK menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yakni sebanyak 5.108 unit rumah KPR sejahtera fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan SSA/SSB belum dimanfaatkan oleh debitur. Dari 5.108 unit rumah itu, sebanyak 538 unit merupakan hasil cek fisik oleh tim dan 4.570 unit berasal dari laporan BTN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) debitur wajib memanfaatkan rumah sejahtera terus menerus dalam waktu satu tahun.

Dalam persoalan ini, pemilik rumah bersubsidi tentunya perlu menggarisbawahi hal ini, karena rumah murah sudah diperuntukkan bagi mereka, sehingga jangan sampai ditelanlarkan. Terlebih, saat ini masih banyak warga yang butuh rumah layak huni. Di wilayah DIY, pemilik rumah bersubsidi juga banyak yang menelantarkan rumah mereka dengan berbagai alasan, seperti kualitas yang jelek, fasilitas umum di lingkungan perumahan yang masih

sangat minim, dan sulitnya akses jalan menuju lokasi.

Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten juga tak boleh tutup mata. Pengawasan harus terus dilakukan, baik dalam hal pemanfaatan maupun dalam proses pembangunan. Hal ini penting karena pembangunan rumah bersubsidi menggunakan anggaran negara. Bukan rahasia lagi jika pembangunan rumah bersubsidi selalu dilakukan asal-asalan. Kualitas bahan bangunan yang jelek serta pengerjaan yang buruk, menjadi persoalan umum dalam setiap pembangunan rumah bersubsidi. Di sinilah

peran pemerintah sangat dibutuhkan.

Selain fungsi pengawasan, pemerintah daerah juga tak boleh lepas tangan. Pemda harus mendukung dengan memberikan atau menyediakan fasilitas pendukung, seperti membangun jalan lingkungan, jaringan air minum, kemudahan perizinan dan lainnya. Dalam pembangunan rumah bersubsidi, kebijakan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah harus sinkron. Dengan kerja sama yang baik, upaya menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa terwujud.

Halo... Jogja

✉ 087839155071

Pesan singkat, padat, tak menyenggung masalah SARA, bukan fitnah, tidak bersifat promotif atau mendiskreditkan pihak atau produk tertentu.

Ketik: <Nama & alamat><isi pesan>.

Tarif normal

mentex harjo hits badegan rt 7 bantul yk 0 08164284xxx

"moga kedepan banyak nama nama jalan di DIY berbagai tokoh, legenda indonesia dari zaman nya, SINIWUN lanjutkan kawulo mata ram dukung panjenengan mersatu kan indonesia lewat budaya.. pak de jokowi lantik sinuwun di djogja ma won nje! suwu pak jokowi."

Suryobening Sleman 087739020xxx

Kepada SAT POL PP Kab. Sleman, sebelum berkembang menjadi bertambah banyak dgn adanya para pedagang kakilima yang berada di jalan magelang Km.7,5 yk tepatnya sebelah timur lapangan sendangadi mlati segera unt diantisipasi dikarenakan pakirnya kendaraan/mobil bagi para pembeli sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, trimakasih

Budi Kurniawan 0813270496xx

Dirgahayu TNI ke-72, Tetaplah Kompak Antar Kesatuan maupun dengan Polisi serta dengan Warga Sipil. Bravo Sayap Pelindung Tanah Airku, Bravo Kartika Eka Paksi, Bravo Jalesveva Jayamahe.



Priliiani
Praktisi dan Pengajar Komunikasi
STAIN Kediri

Acara pertunjukan di Indonesia meleset bak meteor seiring perkembangan teknologi komunikasi. Kota-kota besar semacam Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya dan Bali selalu menjadi tempat bidikan *event organizer* untuk menggelar pertunjukan kelas regional, nasional bahkan internasional. Setelah main di Jakarta pada 2012, Dream Theater kembali menggebrak Tanah Air di Jogja pada 29-30 September 2017.

Dream Theater sebagai grup band rock progresif tentu mempunyai fans yang luar biasa, mengingat grup ini telah puluhan tahun berkarya dengan album-album yang selalu meledak di pasaran internasional. Kedatangan mereka ke Indonesia tentu merupakan jadwal yang sudah terjadwal dengan baik oleh manajemennya. Dan kesempatan ini tentunya harus di kelola secara profesional, mengingat *rundown* mereka cukup padat untuk bisa tampil didepan publik.

Rajawali Communication selaku *event organizer* yang mendatangkan Dream Theater untuk ditampilkan di Candi Prambanan. EO yang bermarkas di Jogja ini terhitung dua kali memindahkan tempat pertunjukan. Ini adalah bagian klasik persoalan penyelenggaraan *event* di Indonesia, mulai problem izin keramaian, ketidaksetujuan masyarakat (tokoh) sekitar sampai kerusuhan penonton. Pemindahan bolak-balik *event* yang bertajuk Jogjarockarta ini menggelitik saya untuk membuat tulisan, karena dulu sampai sekarang persoalan yang muncul selalu hampir sama.

Protes dari beberapa pihak atas *event* ini tentu harus diapresiasi sebagai bagian hak sebagai warga negara atau golongan

tentertu. Persoalannya, apakah bijak memberikan protes ketika *event* digelar H-1 dan panggung sudah berdiri sekitar 70%. Kalau Candi Prambanan dianggap sebagai cagar budaya yang harus dilindungi maka pihak EO pun harus siap dengan konsekuensi atas status ini. Jangan takut sport jantung kalau bergelut dengan dunia *event organizer* karena akan selalu ada persoalan teknis maupun non teknis tatkala menggelar *event*.

Pernyataan Mendikbud yang dilansir oleh beberapa media menyebutkan tidak ada masalah kalau Candi Prambanan digunakan sebagai arena Dream Theater. Di lain pihak, ada protes yang mengatakan akan merusak candi dengan getaran *sound system* dan banyak penonton membawa narkoba dan minuman keras. Tarik ulur ini tentunya membuat pusing penyelenggara acara. Belum lagi calon penonton yang datang dari berbagai penjuru tanah air sudah pesan hotel di sekitar candi prambanan atau di dekat Stadion Kridosono.

Filosofi Roro Jonggrang membangun candi tampaknya mirip dengan femoneman pemindahan *event* ini. Bagaimana tida,

memindahkan panggung dan segala pernik *property event* tidak semudah membalikan telapak tangan. Alokasi dana tambahan tidak sedikit harus ditanggung oleh pihak penyelenggara, belum lagi ketidakpastian *venue* ini akan menambah biaya calon penonton, selain secara psikis mereka bisa tergganggu.

Event secara prinsip bisa menjadi obat pelepas dahaga bagi sebagian masyarakat kita.

Namun, bisa menjadi persoalan serius bagi pihak lain dan lebih parah lagi jika ada upaya untuk menghancurkan reputasi orang/EO dengan membuat polemik atas penyelenggaraan acara ini. Setahu penulis, dunia *event* memang bisa rasional dan irasional.

Realitas acara Dream Theater ini semakin menunjukkan bahwa bangsa ini harus berbenah. Mulai dari birokrasi, talent, EO, ormas bahkan masyarakat sendiri. Event sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wujud aktualisasi diri tetapi juga harus dipikirkan aspek untuk tidak merugikan orang lain dan tidak ada upaya yang sistematis untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu dalam bingkai *event*.

Ketidakadanya tempat pertunjukan yang layak sebenarnya bisa di antisipasi oleh pemerintah untuk membuat venue standart. Dan ini bisa mendatangkan pemasukan bagi pemerintah baik itu di daerah maupun pusat. Talent juga harus bisa mendidik audiens/fans-nya untuk dapat memberi sesuatu yang positif sehingga tidak ada persepsi minor terhadap talent-talent tertentu.

Event organizer juga tidak boleh melakukan langkah spekulatif hanya untuk memperoleh simpati

publik. Meski terdapat strategi dalam marketing event harus ada sesuatu yang lain/aneh dalam menangkap pasar. Ormas atau organisasi masyarakat juga bisa dilibatkan untuk membantu terlaksananya event, karena mereka setidaknya juga punya basis massa dan otoritas tersendiri. Lebih penting lagi masyarakat juga harus bisa menyikapi sebuah event sebagai bagian dari proses bersilaturahmi dan mendatangkan kemaslahatan ummat. Semoga kita bisa belajar bersama dari pengalaman ini. Salam

Kicauan Hari Ini

zaqi rauf setio budi @zaqigool

Baudut, panganan menungso je dicampuri rabuk. Iki seg due pabrik rung tau dikrami raina

@Harian_Jogja

Polisi Gerebek Pabrik Nata De Coco Dicampur Pupuk Urea http://m.harianjogja.com/baca/2017/10/03/polisi-gerebek-pabrik-nata-de-coco-dicampur-pupuk-urea-856227?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ...

Yudi Muhamdi @yudimuhadi

Ini bukti tidak semua orang yang datang ke tempat yang baik untuk tuan yang baik.

@Harian_Jogja

PENCURIAN GUNUNGKIDUL : Lagi Amplifier Masjid Jadi Langganan Maling http://m.harianjogja.com/baca/2017/10/02/pencuri-gungungkidul-lagi-amplifier-masjid-jadi-langganan-maling-856222?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ...

isdianto DU @isdianto88

nah iki bener, langsung neng pok e @Harian_Jogja

Becak Motor Diburu di Semarang, Polisi Segel Bengkel Perakitynya http://m.harianjogja.com/baca/2017/10/02/becak-motor-diburu-di-semarang-polisi-segel-bengkel-perakityna-856347?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ...



POJOK

Penataan Pantai Baron ditentang kalangan nelayan **Penataan perlu dibicarakan**

Penyalahgunaan obat jadi tren di kalangan remaja **Tren yang tidak kerenn**

Harian Jogja

Jumali, Kusnul Isti Qomah, Mayang Nova Lestari, Mediani Dyah Natalia, Nina Atmasari, Rheisnayu Cyntara, Rima Sekarani I.N., Sekar Langit Nariswari, Sunartono, Ujang Hasanudin, Uli Febrinny. **Fotografer:** Desi Suryanto, Gigih Mulistyana Hanafi. **Tim Artistik:** Andi Sudajji, Hendy Prabowo Utomo, Hengki

General Manager Pemasaran: Sri Pujiyingsih. Asisten Manager Iklan: Amelia Rizky. Manager Event: Eko Soetarto. Manager Sirkulasi: Wisnu Wardana. Penerbit: PT Aksara Dinamika Jogja. Direksi: Lulu Terianto (Presiden Direktur). Alamat: Jl. A.M. Sangaji 41 Jogja. Telp: 0274-583183 (Hunting). Faks: 0274-564440. Iklan@harianjogja.com & Sirkulasi@harianjogja.com. Rekening Bank: PT Aksara Dinamika Jogja, Bank Mandiri cab. Katamso 137-000.583966-3. Tarif Iklan: Display BW 20.500/mmkl, FC 33.000/mmkl, kolom 11.500/mmkl, baris 7.000/baris, ducatika BW 10.000/mmkl, FC 13.000/mmkl, hal 1 FC bawah lipatan Rp 80.000/mmkl. Atas lipatan Rp 85.000/mmkl, creative ad BW Rp 26.500/mmkl, FC 42.000/mmkl. Percetakan: PT Solo GrafiKA Utama. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

Wartawan Harian Jogja selalu dibekali tanda pengenal dan dilarang menerima atau meminta uang serta imbalan apapun dari nara sumber terkait dengan pemberitaan.

Daerah Dilarang Lepas Tangan dalam Program Rumah Bersubsidi



RIFKA ANNISA

PUSAT PENGETAHUAN SUMBERDAYA UNTUK PEMERINTAHAN DAN PENGARAHAN

Fenomena Dukun Cabul

dibuat jadi gila ketika tidak menuruti permintaan dukun tersebut. Saat ini, pelaku sudah dilaporkan ke polisi. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar masyarakat teredukasi agar waspada terhadap modus seperti itu?

Y di Jogja

Halo Y di Jogja. Rifka Annisa juga pernah menangani kasus-kasus semacam itu. Karena korban sudah percaya sepenuhnya bahwa dukun dapat menyembuhkan, korban

kemudian tak sadar mau melakukan apa saja yang diminta dukun. Atau dalam kasus yang Anda sebutkan, korban diancam oleh dukun dan kemudian sangat ketakutan.

Karena itu, masyarakat perlu sangat waspada dengan modus semacam itu. Apabila terjadi seperti kasus di atas, jangan mandi dulu, simpan semua baju dan barang yang dikenakan saat peristiwa, kemudian melapor ke kepolisian.

Polis akan meminta keterangan dan mengarahkan ke rumah sakit untuk visum. Yang lebih penting lagi, agar

tidak lagi terjadi peristiwa kekerasan seksual, sebaiknya di lingkungan dapat dilakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Apabila membutuhkan narasumber, Y dapat mengundang narasumber dari Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPKPA) di tingkat desa, kelurahan atau kecamatan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten/Provinsi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres atau

Polda, Rifka Annisa, atau lembaga terkait lainnya. Terima kasih.

Rubrik ini kerja sama Harian Jogja dengan Rifka Annisa. Kirim pertanyaan, opini maupun tulisan Anda mengenai gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hukum ataupun korban kekerasan ke rifka@rifka-annisa.org atau konsultasi.rifka.annisa@gmail.com. Untuk layanan konseling silakan menghubungi nomor telepon (0274) 55333 atau hotline 085799057765 (konseling perempuan dan anak), 085100285002 (konseling laki-laki). Anda juga bisa mengunjungi kantor kami di Jalan Jambon IV Komplek Jatimulyo Indah, Tegalrejo, Jogja.